

## **Ethnic Chinese Retail Trade Activities in Banyuwangi in 1967-1998**

Levi Febryaningrum<sup>1</sup>, Sumarjono<sup>2</sup>, Mohamad Na'im<sup>3</sup>, Kayan Swastika<sup>4</sup>, Akhmad  
Ryan Pratama<sup>5</sup>, Robit Nurul Jamil<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Pendidikan Sejarah, Universitas Jember

Email: levifebria@gmail.com

### **Abstract**

This article discusses the retail trading activities of ethnic Chinese in Banyuwangi in 1967-1998. During this period, various restrictive regulations emerged among the Chinese. One of them is Cabinet Presidium Instruction No. 37/UN/IN/6/1967, which contains a ban on business and residence for foreign Chinese. This condition made retail trading activities to a halt due to the forcible sealing of stores. The outline of the problems studied in this study includes the background of the Chinese ethnic retail trade activity and the formation of the ethnic Chinese retail trade network in Banyuwangi in 1967-1998. The research method used is the historical method which consists of heuristics, criticism, interpretation and historiography. The approach used is an economic sociology approach. The results of the study show that ethnic Chinese are increasingly developing their business by acting as retail traders due to limited capital and no special skills are needed. The establishment of a retail trade network is based on the nature of trust and shared experiences, using the concept of family and ethnic networks. The available commodities are diverse, reflecting the needs of the community and showing the development of the socio-economic life of the people in Banyuwangi.

**Keywords:** Trading activities, ethnic Chinese, Banyuwangi

## PENDAHULUAN

Pada abad ke 19 hingga abad ke 20, etnis Tionghoa di Banyuwangi dapat dikatakan berhasil dan mampu menunai kesuksesan dalam bidang perdagangan, hal itu dapat dipahami bahwa, *pertama*, sebagai minoritas asing yang berada di tengah-tengah masyarakat pribumi maupun etnis asing lainnya yang pada mulanya bersifat eksklusif. Keberadaan etnis Tionghoa memungkinkan terjadi akulturasi kebudayaan, dapat dikatakan demikian bahwa, aktivitas perdagangan yang dilakukan ditentukan oleh hubungan timbal balik dan interaksi sosial. *Kedua*, secara historis, aktivitas perdagangan etnis Tionghoa merupakan kontinuitas dari peranan yang cukup lama, dari kedatangannya untuk berdagang hingga berlanjut pada masa Kolonial yang hanya diizinkan berdagang. Kesuksesan etnis Tionghoa di Banyuwangi mengakibatkan para imigran Tionghoa mengalir semakin banyak dengan motivasi perdagangan (Winarni dan Kartodirjo, 1999:327). Pada tahun 1905 jumlah etnis Tionghoa di Banyuwangi berjumlah 570 orang, sedangkan etnis asing lainnya berjumlah 350 orang. Pada tahun 1920 jumlah etnis Tionghoa mengalami perkembangan secara pesat sebanyak 1.770 orang, sedangkan etnis asing lainnya berjumlah 749 orang (Volkstelling 1930: 174)

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, etnis Tionghoa yang sebelumnya sudah masuk di bidang perdagangan kian marak mengembangkan usahanya dengan berperan sebagai pedagang eceran. Hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan modal, tidak diperlukan keahlian khusus dan berpengalaman di bidang perdagangan (Rimadhani, 2010:2-3). Keberhasilan para pedagang eceran etnis Tionghoa tersebut mengakibatkan ekonomi pribumi menjadi lemah. Hal itu menyebabkan pemerintah Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1959 yang berisi pembatasan aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) Menurut peraturan tersebut, etnis Tionghoa sebagai pedagang eceran yang belum berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dilarang berdagang di daerah pedesaan dan mengalihkan usahanya kepada WNI. Kondisi tersebut mengakibatkan etnis Tionghoa dalam

kondisi yang sulit, karena pada kenyataannya peraturan tersebut juga ditujukan pada etnis Tionghoa yang berstatus WNI (Puspitaviani, 2014:7).

Pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto berusaha melaksanakan kembali peraturan yang membatasi aktivitas ekonomi etnis Tionghoa asing dan ditambah kebijakan asimilasi (pembauran). Tujuannya agar etnis Tionghoa menjadi lebih Indonesia dan meninggalkan ke-Tionghoa-annya. Contoh program asimilasi dalam bidang ekonomi yakni Intruksi Presidium Kabinet No. 37/UN/IN/6/1967 yang berisi mengenai larangan berusaha, berdagang dan bertempat tinggal bagi etnis Tionghoa asing. Intruksi Presidium Kabinet No. 37/UN/IN/6/1967 berdampak pada posisi dan aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi. Dampaknya meliputi, bagi pedagang eceran Tionghoa asing yang tempat usahanya menetap dan tidak memiliki upaya untuk mengurus surat Kewarganegaraan Indonesia, maka pemerintah Indonesia akan menutup tempat usaha tersebut. Beberapa alasan etnis Tionghoa tidak mengurus status Kewarganegaraan Indonesia yakni pertimbangan umur yang kemungkinan besar sudah dari generasi ke-2 atau ke-3 dan karena prosedurnya rumit serta biayanya mahal sekitar Rp 3.000/lembar dan ongkos administrasi Rp 500 (Surabaya Post, 1976:4). Pada tahun 1967 toko-toko etnis Tionghoa asing di segel. Selain disegel, barang-barang yang diperdagangkan diambil secara paksa oleh petugas. Hal itu memicu aksi protes dari etnis Tionghoa di Banyuwangi dan menewaskan 9 pemuda Tionghoa. Menghindari penyegelan toko, beberapa etnis Tionghoa yang menikah dengan WNI, tetap membuka toko dengan memakai nama istrinya selaku WNI sebagai pemilik tokonya dan sebagian segera mengurus status Kewarganegaraan menjadi Indonesia beserta ganti nama (Wawancara dengan bapak Ong Kwek Swie pada tanggal 07 November 2020). Menurut penuturan dari bapak Oei Kian Senc (wawancara pada tanggal 08 Maret 2021) bagi etnis Tionghoa yang sudah berstatus WNI, para pedagang Tionghoa dimasukkan dalam jaringan ekonomi dan perdagangan secara luas (Gintin dan Andayani, 2012:27). Karena, mengingat keberadaan etnis Tionghoa lebih maju disektor perdagangan dan dapat mengembangkan perekonomian nasional.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah : *pertama*, sangat jarang sejawaran menyinggung atau meneliti aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi pada tahun 1967-1998. *Kedua*, dalam fenomena historis, etnis Tionghoa merupakan etnis yang jumlahnya paling banyak diantara etnis lainnya seperti etnis Arab, Belanda, dan India (Paulus, 1917:144). Dominasi jumlah etnis Tionghoa tersebut didasarkan atas persebarannya di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yang pada masa Orde Baru Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi hanya berjumlah 19 Kecamatan dan perKecamatan, etnis Tionghoa yang paling banyak jumlahnya dibanding etnis Arab, Belanda dan India. Hal itu dapat dibuktikan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banyuwangi tahun 1985 yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan per Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi tahun 1985

Kecamatan	WNA			
	Tionghoa	India	Arab	Belanda
Pesanggaran	61	-	-	-
Bangorejo	135	-	-	-
Purwoharjo	45	-	-	-
Tegaldlimo	77	-	-	-
Muncar	200	-	-	-
Cluring	67	-	2	-
Gambiran	234	-	-	1
Glenmore	167	-	1	1
Kalibaru	153	-	-	-
Genteng	630	-	27	-
Srono	142	-	-	-
Singojuruh	68	-	-	-
Rogojampi	345	-	-	-
Kabat	5	-	-	-
Songgon	11	-	-	-
Glagah	10	-	-	-
Banyuwangi	1.078	24	20	-
Giri	59	-	-	-
Wongsorejo	77	-	-	-
Jumlah	3.765	24	50	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 1985: 59.

Garis besar permasalahan yang dikaji dalam artikel ini meliputi latar belakang aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi dan bagaimana terbentuknya jaringan perdagangan eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi tahun 1967-1998. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis latar belakang aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi; (2) Menganalisis terbentuknya jaringan perdagangan etnis Tionghoa di Banyuwangi tahun 1967-1998.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses menganalisis secara kritis rekaman masa lalu untuk menemukan berbagai data yang dapat dipercaya berdasarkan rekonstruksi sejarah (Gotschalk, 1986: 32-34). Tahap metode penelitian sejarah diantaranya: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap pertama yaitu heuristik, diimplementasikan sebagai mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data dan materi sejarah terkait tema penelitian. Menurut jenisnya, sumber yang digunakan dibedakan menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat oleh peneliti dari catatan pribadi pedagang eceran, arsip yang disediakan oleh Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi, Sin Po, Radar Banyuwangi, KITLV dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari Perpustakaan Universitas Jember, Banyuwangi Tempoe Doloe (BTD), Buku-buku milik pribadi, Perpustakaan Stikosa AWS Surabaya dan Internet. Pengumpulan sumber sekunder yang berupa sumber tertulis dilakukan melalui penelusuran artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, Koran-koran seperti Radar Banyuwangi, Jawa Post dan buku-buku hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Tahap kedua, verifikasi sumber. Tujuannya untuk menguji keabsahan (otentisitas dan kredibilitas) sumber. Kritik dilakukan dengan 2 cara, *pertama*, Kritik ekstren untuk melihat apakah informan yang akan diwawancarai benar-

benar dapat dipercaya dengan melihat biografi, latar belakang narasumber baik dari hasil perbincangan dan penilaian dari narasumber lainnya. Sedangkan untuk sumber tertulis, dilakukan dengan memastikan bentuk fisik dari kertas, gaya bahasa, huruf, *author*, tahun dan siapa penanggung jawab terbitan tersebut. *Kedua*, kritik intern dilakukan setelah kritik ekstern, digunakan untuk membuktikan kebenaran sumber tersebut.

Tahap ketiga adalah interpretasi yang berwujud kegiatan menganalisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan fakta fakta sejarah) yang telah ditemukan (Kuntowijoyo, 2013:78). Tahap akhir dari keseluruhan prosedur penelitian sejarah yaitu, historiografi atau penulisan dengan memperhatikan aspek kronologi dan aspek sebab akibat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Aktivitas Perdagangan Eceran Etnis Tionghoa di Banyuwangi**

Aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari di Banyuwangi semakin banyak diminati, apalagi berjualan secara eceran. Keadaan ini terlihat dari permintaan akan kebutuhan pangan maupun sandang yang diminta oleh masyarakat semakin meningkat dan seringkali terjadi hambatan penyaluran barang untuk sampai ke tangan pembeli. Dengan demikian, pasokan barang dari grosir ke pengecer menjadi terhambat dan akan terjadi suatu aksi penimbunan barang yang berdampak pada naiknya harga barang-barang. Hal ini dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa untuk masuk dan merintis usaha perdagangan eceran. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi didasari keputusan etnis Tionghoa untuk masuk dalam bidang tersebut, diantaranya:

#### **1.1 Faktor Umum**

*Pertama*, dilihat dari faktor keadaan yang cukup sulit. Pada masa Orde Baru berdagang secara eceran merupakan pekerjaan yang dianggap cukup mudah untuk dapat menghidupi kebutuhan keluarga. Apalagi pemerintah Soeharto menginstruksikan untuk menyesuaikan harga dan tarif. Pemerintah Soeharto

secara serius mengambil langkah tersebut untuk menjaga agar harga bahan pokok dan beberapa kebutuhan yang lain tetap stabil (Mas'ood, 1989: 88). Sehingga masyarakat setempat tidak kesulitan dalam membeli kebutuhan sehari-hari.

*Kedua*, etnis Tionghoa lebih berpengalaman di bidang perdagangan, jika bertani pun mereka tidak ahli bahkan tidak memiliki lahannya (Wawancara dengan bapak The Djing Swie pada tanggal 21 November 2021). Selain berpengalaman di bidang perdagangan, etnis Tionghoa didukung oleh karakter pekerja keras, ulet, rajin dan hidup sederhana. Karakter tersebut telah membuat etnis Tionghoa berhasil dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya hingga dapat diteruskan secara turun temurun.

## 1.2 Faktor Khusus

*Pertama*, faktor modal. Berdagang secara eceran tidak membutuhkan banyak modal, tetapi keuntungannya lebih banyak dibandingkan grosir. Pada awalnya modal yang dimiliki berasal dari tabungan dari pekerjaan sebelumnya. Sebagian dari etnis Tionghoa ada yang berdagang di pasar. Ada pula sebagian kecil etnis Tionghoa memiliki modal dari hasil tabungan dari negara asal yang kemudian dimanfaatkan untuk membuka toko di pinggir jalan raya besar di

*Kedua*, faktor keluarga. Keberadaannya sebagai pedagang eceran cukup terkenal dalam mengembangkan bisnisnya, yang tentunya tidak terlepas dari warisan leluhur yang diturunkan satu generasi ke generasi berikutnya. Etnis Tionghoa yang memilih berdagang merupakan hasil dari proses sosial yang ditanamkan sejak dahulu, yang dipengaruhi oleh konstruksi orang tua yang mengikutsertakan anak untuk berdagang. Kebiasaan tersebut telah membuat etnis Tionghoa lebih siap dan pandai dalam berdagang apalagi secara eceran (Gerald, 2018:63). Menurut penuturan dari ibu Jenny (Wawancara pada tanggal 24 November 2021), etnis Tionghoa yang berdagang, kebanyakan dikarenakan sejak kecil sudah diajarkan berdagang dan ikut membantu orang tua berjualan. Meskipun tidak mengetahui manfaat mengapa dilibatkan.

Kebanyakan etnis Tionghoa membuka toko dalam perumahan di belakang atau di atas toko. Toko-toko milik etnis Tionghoa berjajar di pinggir jalan atau disekitar pasar dengan menjual berbagai macam kebutuhan (Ningsih, 2018: 67).

Berikut merupakan beberapa toko atau pedagang eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi, yang dapat dilihat pada tabel 1.3 :

Tabel 1.3 Jumlah pedagang eceran berdasarkan jenis barang dagangan di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Genteng dan Kecamatan Gambiran tahun 1967-1998

No.	Jenis Barang Dagangan	Kec.	Kec. Gambiran	Kec. Genteng
		Banyuwangi	Jumlah	
1.	Sembako	5	1	7
2.	Bahan Bangunan	2	2	10
3.	Jamu	1	1	1
4.	Emas	5	3	1
5.	Kelontongan	20	7	15
6.	Bahan Kue	1	-	-
7.	Plastik	1	-	1
8.	Kain	40	1	-
9.	Alat Pancing	1	1	-
10.	Alat Tulis	2	1	3
Jumlah Pedagang Ecer		78	17	38

Sumber: Diolah dari wawancara dengan bapak Ong Kwek Sie pada 07 November 2020; bapak The Djing Swie pada 27 November 2021; dan bapak Suhandoko pada 28 Maret 2022.

## 2. Terbentuknya Jaringan Perdagangan Eceran Etnis Tionghoa di Banyuwangi Tahun 1967-1998

Pada tahun 1967, aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi terganggu akibat keluarnya Instruksi Presidium Kabinet No. 37/UN/IN/6/1967 yang berisi larangan berusaha dan bertempat tinggal bagi etnis Tionghoa asing. Toko-toko milik etnis Tionghoa asing disegel oleh aparat pemerintahan. Pada tanggal 27 Juni 1967, etnis Tionghoa mulai berdemonstrasi untuk memprotes kebijakan tersebut. Demonstrasi tersebut dilakukan di depan pasar Banyuwangi, Jalan Susuit Tubun tempat toko-toko etnis Tionghoa sebagian berada. (Wijaya, 2009:1). Menurut penuturan dari Bapak Ong Kwek Swie (wawancara pada tanggal 07 November 2020), demonstrasi tersebut menyebabkan 9 pemuda Tionghoa ditembak mati akibat menghalangi kerja pemerintahan. Dampak dari Intruksi Presidium Kabinet No. 37/UN/IN/6/1967 terhadap aktivitas perdagangan eceran secara keseluruhan memburuk bahkan membuat etnis

Tionghoa asing di Banyuwangi tidak dapat bekerja. Keadaan tersebut juga membuat arus barang kebutuhan pokok maupun sandang terhenti dan membuat aktivitas perdagangan etnis Tionghoa sepi. Menanggapi kebijakan tersebut, etnis Tionghoa segera mengganti status Kewarganegaraan menjadi Indonesia beserta namanya. tercatat dalam sensus penduduk tahun 1985-1998 terjadi penurunan jumlah etnis Tionghoa asing. Hal itu dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk WNA dan WNI Kabupaten Banyuwangi Tahun 1985, 1987, 1989, 1995, 1996, 1998.

Tahun	WNI	WNA			
		Tionghoa	India	Arab	Belanda
1985	1.363.841	3.765	24	50	2
1987	1.364.312	3.445	24	51	2
1989	1.368.565	3.773	11	51	2
1995	1.446.979	1.712	2	10	-
1996	1.450.484	1.030	2	10	-
1998	1.451.141	607	-	10	-

**Sumber :** Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 1985: 59; Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 1987: 59; Badan Pusat Statistik, 1989: 33; Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 1995: 35, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 1996: 35; Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 1995: 35; Badan Pusat Statistik, 1998: 39.

Kekuatan ekonomi etnis Tionghoa sebenarnya terletak pada jaringan perdagangan yang tercipta di kalangan pedagang. Di Banyuwangi, etnis Tionghoa yang menggeluti aktivitas perdagangan eceran membangun jaringan perdagangan dengan sesama etnis Tionghoa atau sistem *family bisnis*. Contoh bentuk kerjasamanya mengambil stok barang dan mengganti dengan barang yang sama dalam waktu yang berbeda, berbagi informasi seputar pekerjaan, menyebarluaskan berita termasuk tukar menukar berita, dan memperkuat dukungan secara psikologis (Utomo, 2010:50).

Terdapat 4 faktor yang memengaruhi terbentuknya jaringan perdagangan. *Pertama*, norma yang merupakan sekumpulan peraturan yang diharapkan dapat dipatuhi dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Berkaitan dengan norma, toko-toko etnis Tionghoa di pasar Banyuwangi, Genteng maupun Jajag (Gambiran) tentunya terdapat beberapa aturan yang mengatur perilaku-perilaku pedagang agar aktivitas perdagangan berjalan dengan baik. Beberapa aturan di

pasar lebih menyangkut kepada aturan pembagian lapak dan pajak. Menurut penuturan dari ibu Aelings (wawancara pada tanggal 4 April 2022), pembagian lapak di pasar-pasar sudah ditentukan oleh ketua pengelola dengan pedagang disertai harga per lapaknya. Dalam pembagian lapak terdapat perbedaan dalam segi kepemilikan lapak. Ciri khas pasar kawasan pecinan maupun Genteng banyak ditemui pedagang Tionghoa yang menempati lapak sesuai dengan barang yang dijualnya, misal 1 deret terdapat 5 lapak yang menjual kain, 1 deret berikutnya menjual emas dan sebagainya. Hal itu juga memengaruhi jaringan perdagangan yang dapat berkolaborasi maupun berkompetisi bagi para pedagang Tionghoa. Sedangkan dalam hal pajak terdapat perbedaan yang didapatkan etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. Perbedaannya adalah besarnya harga pajak yang harus dibayar oleh pedagang Tionghoa. Menurut penuturan dari Bapak Tang Lung Ik (Wawancara pada 8 Maret 2021), pada masa Orde Baru, para pedagang Tionghoa tetap mematuhi aturan meskipun pembayaran pajak sangat mahal, demi melangsungkan aktivitas perdagangannya.

*Kedua*, ikatan lemah dan ikatan kuat, bisa dikatakan bahwa ikatan lemah merupakan hubungan perkenalan yang terjalin diantara para pedagang yang membawa dampak baik bagi kelangsungan berdagang (Rifky, 2018:53). Menurut penuturan dari bapak The Djing Swie (wawancara pada 24 November 2021), mulainya membangun jaringan perdagangan dengan pedagang Tionghoa lain adalah pertemanan yang terus berjalan dengan intens yang bertemu setiap minggunya atau setiap *me-restock* barang hingga terjalin hubungan yang begitu akrab layaknya keluarga.

*Ketiga*, peran lain yang menjembatani pedagang, seperti media komunikasi (telepon dan layanan pesan singkat) yang keberadaannya penting untuk berinteraksi satu sama lain yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Peran media komunikasi adalah sebagai jembatan antara pedagang dan pembeli untuk bisa lebih membangun interaksi yang intens sehingga terbentuklah jaringan perdagangan yang baik. *Keempat*, keterlekatan sosial, dapat dikaitkan dengan pedagang dan pembeli mengenai bagaimana hubungan yang terjalin didalam aktivitas perdagangan. Beberapa informan mengatakan bahwa hubungan dengan

pelanggan cukup baik hingga membuat proses jual-beli lebih terasa akrab (Rifky, 2018:61).

Proses pengadaan barang (distribusi) atau masuknya barang ke toko-toko etnis Tionghoa melalui 2 cara. *Pertama*, dibawa secara langsung yaitu barang yang berasal dari Surabaya dan sekitarnya serta dari wilayah pedalaman Banyuwangi. *Kedua*, melalui jasa pengiriman yaitu barang yang berasal dari luar negeri (Tiongkok).

Di bidang perdagangan pertanian, seperti beras, jagung, ketan, kacang tanah, kacang hijau yang dipasok oleh etnis Tionghoa dibeli langsung dari masyarakat pribumi di pasar Jajag, Genteng dan Banyuwangi (Wawancara dengan bapak The Djing Swie, pada tanggal 21 November 2021). Sedangkan di bidang manufaktur terutama tekstil didatangkan dari Negara Tiongkok dan India yang menjadi negara penghasil tekstil terutama kain sutra dan mori sebagai bahan dasar batik. Untuk kain batik diambil dari produksi lokal seperti di kota Surabaya tepatnya di jalan Bongkaran dan jalan Slompretan (Wawancara dengan bapak Tang Lung Ik pada tanggal 8 Maret 2021). Jalan Bongkaran dan jalan Slompretan merupakan pusat toko-toko besar yang menjual tekstil sejak tahun 1950. Selain bidang manufaktur, etnis Tionghoa juga memasok emas dari Surabaya yang diperoleh dari hasil penambangan emas bercampur dengan tanah (*alluvial goud*) dan serbuk emas (*stofgoud*) (wawancara dengan bapak Shan Shan 29 Maret 2021). Pedagang Tionghoa juga mengambil barang seperti plastik, sepatu, mainan dan alat tulis dari Surabaya (wawancara dengan ibu Aelings pada 4 April 2022).

Barang-barang dagang dibawa melalui jalan darat dan udara. Namun, sebagian besar masyarakat menggunakan transportasi darat seperti mobil barang (*vracht auto*) dan bis umum (*bussen algemeen*) yang telah diadakan sejak tahun 1918 untuk memudahkan proses pengadaan barang (Listiana, 2013:84). Sedangkan transportasi udara, digunakan etnis Tionghoa untuk memasok barang dagangan langsung dari Negara Tiongkok, melalui jasa pengiriman, seperti obat-obatan herbal (wawancara dengan Risky pada 8 Maret 2021).

Setelah melalui proses distribusi, barang-barang yang masuk toko-toko menjadi komoditas. Komoditas perdagangan eceran etnis Tionghoa pada awal

keberadaannya hanya meliputi hasil bumi dan barang-barang produksi Negara Tiongkok. Perkembangan jenis komoditas kemungkinan terjadi sejak perluasan jaringan perdagangan. Komoditas yang tersedia berdasarkan beberapa sumber antara lain: Beras, Rokok, Gula pasir, Gula merah, Susu, Sabun mandi- cuci piring-baju, Biskuit, Minuman kemasan, Obat-obatan, Bahan-bahan tekstil, Barang-barang kelontong, Bahan bangunan, Bedak, Korek api, Plastik, Obat-obatan, Sampo, Deodorant, Sapu tangan, handuk, Permen, Coklat, dan Pasta. Diantara komoditas konsumsi yang dijual pedagang eceran etnis Tionghoa, terdapat tiga komoditas dengan jumlah pasokan terbesar, yakni bahan-bahan tekstil (*manufakturen*), beras, dan rokok (wawancara dengan ibu Adel pada 2 April 2022 dan bapak The Djing Swie pada 21 Maret 2021). Dalam perkembangannya, aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa telah menjadi kelompok sosial-ekonomi kelas atas yang dapat mempertahankan usahanya dan ada pula yang usahanya berkembang pada skala agen besar atau grosir.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada masa Orde Baru, situasi dan kondisi di Banyuwangi masih belum stabil. Berbagai permasalahan di bidang sosial, budaya dan ekonomi bermunculan di kalangan masyarakat. Salah satu permasalahan di bidang ekonomi adalah tentang arus distribusi perdagangan barang yang masih kurang lancar. Permintaan akan kebutuhan barang yang diperlukan oleh masyarakat setiap harinya kian meningkat. Keadaan tersebut akan menimbulkan terhambatnya pasokan barang dari grosir yang kemudian disalurkan kepada pengecer. Keadaan ini akan berdampak pada suatu aksi penimbunan barang sehingga harga barang-barang di pasaran menjadi naik. Untuk menghindari hal tersebut peran aktivitas perdagangan eceran sangat dibutuhkan dalam menyalurkan barang untuk sampai ke tangan pembeli. Melihat keadaan itu, etnis Tionghoa semakin banyak mengembangkan usahanya sebagai pedagang eceran. Hal itu dikarenakan faktor keterbatasan modal, tidak diperlukan keahlian khusus, faktor keluarga dan berpengalaman di bidang perdagangan.

Terbentuknya jaringan perdagangan eceran etnis Tionghoa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya norma, ikatan lemah dan kuat, media komunikasi dan keterlaksanaan sosial. Aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa tidak terlepas dari jaringan yang tercipta di kalangan pedagang dengan menggunakan konsep jaringan keluarga atau sesama etnis Tionghoa yang dibangun secara turun temurun yang didasari sifat kepercayaan, keuletan dan etos kerja yang baik. Aktivitas perdagangan eceran etnis Tionghoa di Banyuwangi telah membantu masyarakat dalam memnuhi kebutuhan tanpa harus membeli barang secara partai besar dan keberadaannya banyak ditemui di pasar-pasar tradisional maupun sepanjang pinggir jalan raya besar. Ragam komoditas yang tersedia menggambarkan minat dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menunjukkan perkembangan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Banyuwangi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, F dan Prasetyo, K.B. 2015. *Etos Budaya Kerja Pedagang Etnis Tionghoa Di Pasar Semawis Semarang*. Jurnal Solidarity. Vol 4(1). Hal 1-25.
- Badan Pusat Statistik. 1986. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 1985*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 1987. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 1986*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 1988. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 1987*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 1991. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 1990*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 1996. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 1995*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik. 1999. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 1998*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Koordinasi Intelijen Negara. 1979. *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina Di Indonesia*. Jakarta. <https://docplayer.info/212533130-Pedoman->

penyelesaian-masalah-cina-di-indonesia-buku-1-badankoordin4si-intewen-negara.html.

- Bappeda. 2013. *Bappeda Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Banyuwangi 2013*. Banyuwangi.<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-banyuwangi-2013.pdf>.
- Coppel, C.A. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chaniago, A.A. 2012. *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Dahana, A. 2000. *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*. Jurnal Wacana. Vol 2 (1): 54-72.
- Ginting, D.H dan Andayani, T. 2012. *Peranan Masyarakat Tionghoa Dalam Perdagangan Perekonomian Di Kota Binjai Pada Tahun 1968-2008*. JUPIIS.Vol 4 (2).
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah, (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto)*. Yayasan Penerbit UI: Jakarta.
- Groeneveldt, W.P. 2009. *Nusantara Dalam Catatan Tionghoa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kharisma, F. 2015. *Kerajaan Blambangan Tahun 1736-1768 Sebagai Muatan Lokal Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Atas*. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Laily. K.N. 2016. *Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*. *Skripsi*. Jember: Program Studi Pendidikan Jember Universitas Jember.
- Liem, Y. 2000. *Prasangka Terhadap Etnis Cina: Evaluasi 33 Tahun di Bawah Rezim Soeharto*. Jakarta: Djambatan.
- Listiana, D.2013. *Tumbuh dan Berkembangnya Sebuah Pasar Kota : Pasar Cina Pontianak Abad Ke-19 Sampai Abad Ke-20*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan

Nilai Budaya.

- Lekkerkerker, C.1923. *De Indische Gids: Blambangan*. BTD (Banjoewangi Tempoe Doloe).
- Lombard, D. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya: Bagian II Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Margana, S. 2012. *Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Mas' oed, M. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Mudiarta, K. G. 2011. *Perspektif Dan Peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 29 (1): 55-66.
- Muslim, M.M. 2019. *Pedagang Warung Etnis Tionghoa Dalam Perekonomian Kota Surabaya Tahun 1950-1959*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 408/MPP/Kep/1997. *Ketentuan dan tata cara pemberian tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)*. 31 Oktober 1997. Jakarta
- Ningtyas, I. 2018. *Hoo Tong Bio : Kisah Kelenteng Tertua di Ujung Timur Jawa*. Yogyakarta : Diomedia.
- Ningsih, L. 2018. *Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoadi Mojokerto Tahun 1959-1980*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nurchahyo, D.A. 2016. *Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Darma.
- Noordjanah, A. 2010. *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta. Ombak.
- Paulus, J. 1917. *Encyclop Aedie Van Nederlandsch-Indie. Tweede Druk. Met Medewerking Van Verschiliende Geleerden Ambtenarn en Officieren*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 286/KP/XII/78. *Menteri Perdagangan dan Koperasi*. 28 Desember 1978. Jakarta.

- Puspitaviani, S. 2014. *Aktivitas Ekonomi Etnis Tionghoa Di Tuban Tahun 1945-1959. Skripsi.* Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
- Prasetyo, Y. 2015. *Sejarah Komunitas Tionghoa di Yogyakarta 1900-1942.* Jurnal Edukasi. Vol 1: 19-32.
- Rahayu, S.D.I.R. Tanpa Tahun. *Etnis Tionghoa Dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya.* Surabaya: Revka Petra Media.
- Rimadhani, 2010. *Pedagang Eceran Tionghoa di Surabaya 1950-1960. Skripsi.* Surabaya: Universitas Airlangga.
- Salmon, C dan Sidharta, M. 2000. *Dari Kapten Hingga Nenek Monyang yang Didewakan : Pemujaan Terhadap Kongco Di Jawa Timur dan Bali (Abad Ke-18 dan 20.* Banyuwangi : BTD.
- Samsubur. 2011. *Sejarah kerajaan Blambangan.* Surabaya: Paramita.
- Suryadinata, L. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa.* Jakarta: PT Temprint.
- Setiono, B.G. 2002. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik.* Jakarta: Elkasa
- Suryadinata, L. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa.* Jakarta: PT Temprint
- Swedberg, R dan Smelser N.J. 2005. *The Handbook Of Economic Sociology.* Inggris Raya: Princeton University Press
- Utomo, C.A. 2010. *Peran Etnis Cina Dalam Perdagangan Di Surakarta Pada Tahun 1959.1998.* Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Winarni, R dan Kartidirjo, S. 1999. *Aktivitas Ekonomi Perdagangan Orang-orang Cina di Pantai Utara Jawa Timur Pada Abad XVII.* Jurnal Sosiohumanika. Vol 12 (3). Hal 323-337.
- Wirawan, Y. 2013. *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar Dari Abad ke-17 hingga ke-20.* Tesis. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wijaya. J. 2009. *In Memory Of Martyrs: The Nine Victims Of The Killings In Banyuwangi On 27 June 1967.* <https://www.insideindonesia.org/in-memory-of-%20martyrs>.
- Volkstelling 1930. *Census Of 1930 In The Netherlands Indies Volumen VII: Chinese And Other Non-Indigenous Orientals In The Netherlands Indies.* Batavia: Departement Van Economische Zaken.

Yulianingtyas, V. 2015. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Kecamatan Banyuwangi (1967-2014). *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang.